

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Amirudin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewanta, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Djumhana, Muhamad, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fauzi *et all*, 1982, *Cara Membaca APBD*, Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya, Malang.
- Goesniadhie, Kusnu, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Karianga, Hendra, 2011, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Alumni, Bandung.
- Kencana, Inu, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

- Mochtar, Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Nawi, Syahrudin, 2016, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Salam, Dharma Setyawan, 2007, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djembatan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Mengikat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suharizal, 2010, *Demokrasi Pemilukada Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, UNPAD Press, Bandung.
- Sujamto, 1994, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunindhia, Y.W., 1996, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syaukani *et all*, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Wahyono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

**B. Makalah/Artikel, Majalah dan Jurnal Hukum**

Ariflanti *et all*, 2013, “Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)”, *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, UNS, Surakarta

Artadi, Ibnu, “Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi Oktober 2006.

Jafar, Wahyudi, ”Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010.

Muabezi, Zaherman Armandz, “Negara berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) bukan Kekuasaan (Mahtsstaat)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, November 2017.

Nurhemil dan Guruh Suryani, “Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 18, Nomor 2, Oktober 2015.

Putuhena, Ilham, “Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif”, *Jurnal Rechtvinding*, Volume 2 Nomor 3, Desember 2013.

Ulfa, Nur Alfina, “Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah dengan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja”, *Jejaring Administrasi Publik*, Th V. Nomor 2, Juli-Desember 2013.

Rossana, Ellya, “Hukum dan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal TAPIs*, Vol.9 No.1 Januari-Juni 2013.

Setiadi, Wacipto, 2007, “Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislatif Indonesia* Vol. 4 No. 2.

Suseno, Agung, “Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 17 Nomor 1, Januari- April 2010

### **C. Skripsi / Tesis / Disertasi**

Apituley, 2002, “Pengawasan Penggunaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Iranisa, 2016, “Analisis Peran Inspektorat Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada Pengelolaan Keuangan Desa (Penelitian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Kidul D.I. Yogyakarta)”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Saputra, Riza Irawan, 2015, “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta”, Tugas Akhir, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suhartono, 2011, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien)”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Depok.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 Tentang Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-001/A/JA/10/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas TP4D Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 014/A/JA/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

## **E. Internet**

Angriani, Desi, "Targetkan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Fokus Kembangkan Indonesia Timur", *Media Indonesia*, <http://mediaindonesia.com/news/read/117954/targetkan-pertumbuhan-ekonomi-5-4-pemerintah-fokus-kembangkan-indonesia-timur/2017-08-16> diakses pada Kamis, 19 Oktober 2017, pukul 01.30 WIB

Asshiddiqie, Jimly, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) pada 23 Oktober 2017, pukul 12.30 WIB

Fariana, Andi, “Tujuan Hukum”, *Perbanas Institute*, diakses melalui <https://dosen.perbanas.id/tujuan-hukum/> pada 30 Januari 2018 pukul 20.06 WIB

Indrawan, Angga, “BPK: Pengelolaan Keuangan Daerah Masih Jadi Masalah”, *Republika*, diakses melalui <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/04/nnu386-bpk-pengelolaan-keuangan-daerah-masih-jadi-masalah> pada Jumat 27 Oktober 2017, pukul 13.28 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada Senin, 26 Februari 2018 pukul 11.00 WIB

Simohang, E.C., “APBD Jadi Bancakan, KPK Anggap Pejabat Daerah Tamak”, *beritasatu.com* diakses melalui <http://www.beritasatu.com/hukum/446604-apbd-jadi-bancakan-kpk-anggap-pejabat-daerah-tamak.html> pada Kamis, 19 Oktober 2017, pukul 02.13 WIB

Visi Misi Jokowi-JK diakses dari [kpu.go.id/koleksigambar/VISI\\_MISI\\_Jokowi-JK.pdf](http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf) pada Kamis, 19 Oktober 2017, pukul 01.15 WIB